

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DAERAH DITINJAU DARI ASPEK
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari
Kabupaten Bengkalis)**

Oleh :

Abdul Hakim

Pembimbing : Wahyu Hamidi dan Dahlan Tampubolon

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : abdul.hakimrasyidfe@gmail.com

*Analysis The Impact Of Regional Expansion Viewed From The Aspect
Accelerating Economic Growth And Improving
Quality Public Service
(Expansion Study: Kepulauan Meranti Of Bangkalis Regency)*

ABSTRACT

Since the enactment of Law No. 22 year 1999 on Regional Government, the phenomenon of regional expansion in Indonesia was growing. Post-birth of the Act, in Riau province have formed a new autonomous region 6 under Law No. 53 Year 1999. From 6 DOB formed, Kepulauan Meranti Regency is DOB youngest of which was formed in 2009 under Law No.12 Year 2009. This study to analyze the impact of Regional Expansion Kepulauan Meranti regency after the secession of the District Bangkalis especially from the aspect of accelerating economic growth and improving the quality of public services. This research uses descriptive quantitative method and test hypotheses using t-test. The results of this study showed that there was no significant difference on the performance of the regional economy Kepulauan Meranti regency after the expansion, the impact of the expansion have not indicated a positive result of the acceleration of economic growth while the performance of public services there are significant differences after the expansion, the impact of the division showed positive results towards improving the quality of local public services. This is thought to occur because the area is getting smaller so that the span of control is getting better.

Keyword: Regional Expansion, New Autonomous Regional, The Regional Economic, Public Service.

PENDAHULUAN

Sejarah era pemekaran daerah di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat fase yaitu era perjuangan kemerdekaan (1945-1950), era demokrasi terpimpin dan orde lama (1950-1966), era orde baru (1966-1998) dan era reformasi (1999-

sekarang) (Said Saile, 2009: 24-27). Pasca tumbangannya rezim otoritarian yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998 dan dibentuknya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, fenomena pemekaran daerah di Indonesia semakin berkembang.

Perkembangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terhitung sejak tahun 1999-2014, jumlah daerah otonomi baru (provinsi/ kabupaten/kota) adalah 223 DOB yang terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten dan 34 kota (KEMENDAGRI,2015).

Diberlakukannya Undang-Undang No.32/2004 tentang otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengusulkan diri untuk menjadi daerah otonom baru dengan tujuan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan bagi daerahnya. Pembentukan daerah otonomi baru atau yang biasa disebut pemekaran daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayah masing-masing. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis di maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Di dalam PP tersebut di sebutkan bahwa tujuan pemekaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, (2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, (3) percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, (4) peningkatan keamanan dan

ketertiban, serta (5) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Rachim (2013:4) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat dua alasan yang melatarbelakangi maraknya fenomena pemekaran wilayah di Indonesia diantaranya: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru diasumsikan akan lebih efektif dan efisien dibandingkan daerah induk. sesuai dengan kebutuhan lokal. 2. Percepatan pertumbuhan Ekonomi, Pemekaran daerah diasumsikan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal.

Beberapa pihak merasa bahwa pemekaran bukanlah jawaban utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ida, 2005). Fitriani et al. (2005) menegaskan bahwa pemekaran membuka peluang untuk terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah, baik dana dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Di sisi lain, sebagai sebuah daerah dituntut untuk mewujudkan kemampuannya mengali potensi daerah. Hal ini bermuara kepada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menghasilkan suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi.

Bersamaan dengan pandangan bahwa prinsip pembentukan daerah otonom adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun kenyataan yang ada pembentukan daerah otonom lebih banyak menimbulkan masalah-masalah yang baru, baik yang berkaitan dengan hubungan antara

daerah, antar masyarakat sampai ke tahap tidak berhasil, sebagaimana dinyatakan Sujianto (2010) :Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2010 tentang evaluasi pelaksanaan pemerintahan kabupaten/kota yang baru dikemukakan hanya 20% dari jumlah tersebut yang berhasil. Artinya 80% kabupaten/kota yang baru tidak berhasil dan dinyatakan gagal dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom yang baru.

Di provinsi Riau ada 5 daerah otonom baru yang terbentuk pasca dilahirkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Kelima daerah otonom baru tersebut terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 meliputi Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik memang menjadi alasan sekaligus tujuan dalam berbagai kasus pemekaran daerah. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termuda di wilayah Propinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2008, dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 dan memulai pemerintahan secara resmi pada tanggal 16 Januari 2009.

Tidak meratanya pembangunan serta kurangnya aspek pelayanan publik menyebabkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk melepaskan diri dan membentuk daerah otonom baru.

Wilayah yang memiliki luas 3.714,20 km² ini memiliki jumlah penduduk 183.912 jiwa yang terdiri dari Sembilan kecamatan (Kecamatan Tebing Tinggi , Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu) memerlukan perhatian dan pelayanan yang ekstra dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Masalah fasilitas layanan publik dan kurangnya perhatian pemerintah turut menguatkan alasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melepaskan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dari uraian diatas, peneliti ingin menganalisis Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan rentang kendali pasca memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis terutama ditinjau dari aspek percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana dampak pemekaran ditinjau dari aspek percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti setelah kebijakan pemekaran diberlakukan? 2) Bagaimana dampak pemekaran ditinjau dari aspek peningkatan pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Meranti setelah kebijakan pemekaran diberlakukan? 3) Bagaimana rentang kendali (*span of control*) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Meranti setelah kebijakan pemekaran diberlakukan?

Tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk menganalisis dampak pemekaran ditinjau dari aspek percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti setelah kebijakan pemekaran diberlakukan yaitu pada tahun 2009-2014. 2) Untuk menganalisis dampak pemekaran ditinjau dari aspek peningkatan pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Meranti setelah kebijakan pemekaran diberlakukan yaitu pada tahun 2009-2014. 3) Untuk menganalisis kondisi rentang kendali (*span of control*) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Meranti setelah kebijakan pemekaran diberlakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Dalam UU No 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Span Of Control

Pada umumnya organisasi lebih menyukai rentang yang kecil untuk mempertahankan kendali yang ketat. Seorang manajer akan berhadapan dengan masalah-masalah

yang semakin beragam kerumitannya dan seringkali tidak terstruktur, oleh karena itu para manajer puncak seharusnya mempunyai rentang kendali yang lebih kecil daripada manajer menengah dan para manajer menengah memerlukan rentang kendali yang lebih kecil daripada para penyelia (Robbin dan Coulter, 2004).

Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pada dasarnya pemekaran wilayah bertujuan untuk memperpendek rentang pemerintahan agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Latar Belakang Pemekaran

Beberapa alasan yang mendorong pemisahan diri suatu daerah atau pemekaran wilayah yaitu (Antonius Tarigan, 2010):

- 1) *Preference for homogeneity* (kesamaan kelompok) atau *historical ethnic* memungkinkan ikatan sosial dalam satu etnik yang sama perlu diwujudkan dalam satu daerah yang sama.
- 2) *Fiscal spoil* (insentif fiskal untuk memekarkan diri, dapat dari DAU/DAK), adanya jaminan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Umum, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menghasilkan keyakinan bahwa daerah tersebut akan dibiayai.
- 3) *Beaurocratic and political rent seeking* (alasan politik, dan untuk mencari jabatan penting/mobilitas vertikal). Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan

memunculkan wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat.

- 4) *Administrative dispersion*, mengatasi rentang kendali pemerintahan. Alasan ini semakin kuat mengingat daerah-daerah pemekaran merupakan daerah yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau.

Syarat Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada tiga kriteria yang menjadi persyaratan dalam usulan pemekaran wilayah yaitu:

- 1) Syarat Administratif
Syarat administratif didasarkan pada aspirasi masyarakat setempat yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah seperti DPRD, bupati atau walikota dan gubernur, serta rekomendasi menteri dalam negeri terhadap rencana pembentukan daerah.
- 2) Syarat Teknis
Syarat teknis didasarkan oleh kemampuan ekonomi, potensial daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan, serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- 3) Syarat Fisik Kewilayahan
Syarat fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi, calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintah.

Indikator Kinerja Ekonomi Daerah

Ada empat indikator yang mencerminkan kinerja ekonomi daerah diantaranya, (BAPPENAS, 2008):

- 1) Pertumbuhan Ekonomi
Indikator ini menunjukkan gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi daerah.
- 2) Pertumbuhan PDRB per kapita
Indikator ini mencerminkan pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang membaik.
- 3) Rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi
Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah propinsi. Besarnya tingkat perkembangan dikorelasikan dengan perbaikan kinerja ekonomi daerah.
- 4) Angka kemiskinan
Baiknya kinerja ekonomi dapat dilihat dari jumlah angka kemiskinan di daerah yang bersangkutan. Kinerja ekonomi yang baik akan menciptakan pembangunan ekonomi yang seharusnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Indikator Pelayanan Publik Daerah

Ada empat indikator yang mencerminkan kinerja pelayanan publik daerah diantaranya, (BAPPENAS, 2008):

- 1) Rasio siswa per sekolah
Indikator ini mengindikasikan daya tampung sekolah di satu

daerah. Rasio sekolah menunjukkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang merupakan bagian dari pelayanan publik di bidang pendidikan.

- 2) Rasio siswa per guru
Indikator ini menyangkut ketersediaan tenaga pendidik. Ketersediaan tenaga pendidik yang cukup menunjukkan baiknya pelayanan publik di suatu daerah.
- 3) Ketersediaan fasilitas kesehatan
Ketersediaan tenaga kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10ribu penduduk. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan.
- 4) Ketersediaan tenaga kesehatan
Ketersediaan tenaga kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10ribu penduduk. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, tenaga paramedis dan pembantu paramedis.

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang dapat peneliti rangkum berdasarkan perumusan masalah diatas adalah:

- 1) Dari Aspek Perekonomian, pembentukan daerah otonom baru hasil pemekaran daerah tidak berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2) Dari Aspek Pelayanan Publik, pembentukan daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 3) Hasil pemekaran dari kinerja ekonomi daerah belum membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap

percepatan pertumbuhan ekonomi dan sedangkan dari kinerja pelayanan publik daerah semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kabupaten kepulauan meranti pasca pemekaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti provinsi Riau yang merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Daerah yang dianalisis adalah daerah yang mekar pada tahun 2009, sebab telah melaksanakan otonomi daerah lebih dari lima tahun. Pemilihan waktu lima tahun ini didasari atas terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) pada awal pemerintahan DOB. Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data time series dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya (Moleong,2002).

Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif menggunakan *Uji Independent Sampel T-Test*, yaitu membandingkan dua kelompok mean dari dua sampel yang berbeda. Sebelum uji-t terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dan

uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui hasil data tersebut didistribusi normal atau homogen. Metode *two independent samples test* atau uji *Mann Whitney* sebagai alternatif dari uji *independent samples t test* jika data tidak berdistribusi normal Uji $-t$, uji normalitas, uji homogenitas tersebut dibantu dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 23.0 tahun 2016.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kinerja Ekonomi

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah kinerja ekonomi selama periode 2009-2014. Indikator ekonomi yang dianalisis meliputi Pertumbuhan PDRB non-migas, Pertumbuhan PDRB perkapita, Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi dan Angka Kemiskinan.

2) Kinerja Pelayanan Publik

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kinerja pelayanan publik selama periode 2009-2014. Indikator ekonomi yang dianalisis meliputi Jumlah siswa persekolah, Jumlah siswa perguruan, Ketersediaan Fasilitas Kesehatan, Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Kualitas Infrastruktur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Tabel 1
Perbandingan Nilai Rata-Rata Indikator Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis

| Indikator Ekonomi | Kabupaten Meranti | Kabupaten Bengkalis |
|---|-------------------|---------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi ADHK (%) | 7,38 | 5,5 |
| Pendapatan Perkapita ADHK (juta rupiah) | 9 | 7 |
| Kontribusi PDRB Kabupaten (%) | 3 | 7 |
| Angka Kemiskinan (%) | 36,52 | 7,40 |
| Pertumbuhan Penduduk Tidak Miskin (%) | 3,31 | 0,29 |

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari analisa terhadap indikator ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibandingkan dengan Kabupaten Bengkalis, didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi ADHK tahun 2009-2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,38% lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi ADHK Kabupaten Bengkalis sebagai daerah induknya yaitu sebesar 5,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi DOB sudah mampu menyaingi bahkan lebih baik dari daerah induknya.

Rata-rata PDRB per kapita ADHK tahun 2009-2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp.9 juta lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita ADHK Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar Rp.7 juta. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan sosial DOB (Kabupaten Meranti) lebih baik dari pada tingkat kesejahteraan sosial daerah induknya

(Kabupaten Bengkalis) pasca pemekaran.

Rasio kontribusi PDRB daerah DOB terhadap PDRB provinsi jauh lebih rendah dibandingkan daerah induknya yaitu berkisar 3% sedangkan Kabupaten induk 7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktifitas perekonomian daerah otonom baru (Kabupaten Meranti) sudah tumbuh dan perlu peningkatan agar lebih baik bisa bersaing dengan kabupaten Induk.

Rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Meranti sebesar 36,52%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis sebagai daerah induknya yaitu sebesar 7,40%. Hal ini menunjukkan kebijakan pemekaran daerah pada kabupaten Meranti belum berhasil membawa kabupaten Meranti keluar dari kemiskinan.

Trend pertumbuhan penduduk tidak miskin Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menunjukkan angka yang lebih besar dari daerah induknya yaitu Kabupaten Bengkalis. Rata-rata pertumbuhan penduduk tidak miskin pada DOB sebesar 3,31 dan 0,29. Maka sesuai dengan indikator kemiskinan dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti jauh lebih rendah dari Kabupaten Bengkalis pasca pemekaran.

Tabel 2
Perbandingan Nilai Rata-Rata Indikator Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis

| Indikator Ekonomi | Kabupaten Meranti | Kabupaten Bengkalis |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Rasio Siswa per Sekolah (SD dan SMP) | 145 | 231 |
| Rasio Siswa per Guru (SD dan SMP) | 11 | 15 |

| | | |
|--|-------|-------|
| Rasio Siswa per Sekolah (SMA) | 280 | 382 |
| Rasio Siswa per Guru (SMA) | 11 | 14 |
| Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan | 2,89 | 1,37 |
| Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan | 11,16 | 17,55 |
| Kualitas Infrastruktur Jalan (%) | 33,41 | 50,76 |

Sumber : Data Olahan, 2016

Secara umum perkembangan rasio jumlah ketersediaan sekolah tahun 2009-2014 baik Tingkat Dasar dan Menengah (SD dan SMP) Kabupaten Meranti menunjukkan kinerja yang baik. Rata-rata rasio ketersediaan sekolah adalah 145, maknanya adalah setiap 1 sekolah untuk sekitar 145 orang anak usia sekolah atau untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah baik tingkat dasar maupun menengah terdapat sebanyak rata-rata sekitar 69,59 buah sekolah. Sedangkan Kabupaten Bengkalis adalah 231, maknanya 1 sekolah untuk sekitar 231 orang anak usia sekolah atau untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah baik tingkat dasar maupun menengah terdapat sebanyak rata-rata sekitar 43,31 buah sekolah. Ditingkat sekolah Menengah Atas (SMA) rata-rata rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Meranti lebih rendah dari DOB yaitu hanya 280, maknanya adalah 1 sekolah untuk sekitar 280 orang anak usia sekolah atau setiap 10.000 penduduk usia sekolah terdapat sebanyak rata-rata sekitar 37,11 buah sekolah. Sedangkan ketersediaan sekolah Kabupaten Bengkalis adalah 382; 1 sekolah untuk sekitar 382 orang siswa atau setiap 10.000 penduduk usia sekolah terdapat

sebanyak rata-rata sekitar 2664 buah sekolah.

Rasio Guru terhadap Murid tingkat dasar dan menengah (SD dan SMP) menyatakan ketersediaan guru untuk melayani sejumlah murid. rata-rata rasio guru per murid Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 11, angka ini menggambarkan satu orang guru melayani sekitar 11 orang siswa sedangkan Kabupaten Bengkalis yaitu 15, angka ini menggambarkan satu orang guru melayani sekitar 15 orang siswa. Kemudian untuk tingkat SMA rata-rata rasio siswa per guru Kabupaten Bengkalis tergolong tinggi jika dibandingkan DOB yaitu 14; 11. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mampu menyaingi Kabupaten bahkan jauh lebih baik terhadap efektifitas pengajaran dan pendidikan tinggal saja peningkatan kualitas tenaga pendidikannya.

Ketersedian fasilitas kesehatan dianalisa dari ketersediaan fasilitas kesehatan dasar seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu. Dari rasio ketersediaan fasilitas kesehatan per 10.000 orang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis dari tahun 2009 sampai 2014. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata rasio ketersediaan fasilitas kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten induk yaitu diatas 2,89 dan 1,37; ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 3 unit fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas dan pustu untuk setiap 10.000 orang penduduk atau di kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Kabupaten Bengkalis hanya terdapat 1 unit fasilitas kesehatan untuk di setiap kecamatan. Maka dapat di

simpulkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan daerah DOB tumbuh dengan sangat pesat pasca pemekaran

Rasio ketersediaan tenaga kesehatan per 10.000 orang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis dari tahun 2009 sampai 2014. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata rasio ketersediaan fasilitas kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten induk yaitu diatas 11,16 dan 17,55; ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 11 orang tenaga kesehatan yang meliputi Dokter, bidan, perawat dan apoteker untuk setiap 10.000 orang penduduk atau di kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Kabupaten Bengkalis lebih banyak yaitu 18 orang tenaga kesehatan untuk di setiap kecamatan.

Kualitas infrastruktur yang diukur melalui persentase jalan dalam kondisi baik, terhadap total panjang ruas jalan menunjukkan bahwa selama periode 2009-2014 prosentase jalan dalam kondisi baik Kabupaten Kepulauan Meranti tergolong rendah hanya sekitar 30 persen dari total panjang jalan kabupaten sedangkan prosentase jalan dalam kondisi baik Kabupaten Bengkalis tergolong tinggi sekitar 60 persen jalan dalam kondisi baik dari total panjang jalan kabupaten. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya efektifitas fungsi jalan dan kinerja perbaikan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Analisis Pengujian Hipotesis

Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Uji Independent
Indikator Ekonomi di Kabupaten
Kepulauan Meranti dan Kabupaten
Bengkalis

| No | Indikator | Asymp. Sig. (2-tailed) | Kesimpulan |
|----|---|------------------------|------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonom Baru | 0,150 | >0,05 |
| 2 | Rasio Kontribusi PDRB terhadap Provinsi | 0,040 | <0,05 |
| 3 | Pertumbuhan PDRB Perkapita | 0,082 | >0,05 |
| 4 | Angka Kemiskinan | 0,006 | <0,05 |
| 5 | Pertumbuhan Penduduk Tidak Miskin | 0,401 | >0,05 |

Sumber: Data Olahan, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Uji Independent Sample T-Test menggunakan SPSS indikator Kinerja Perekonomian Daerah yang disajikan pada tabel 3 diketahui pada kolom *Levene's Test for Equality of Variances* memiliki nilai signifikansi:

- 1) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonom Baru sebesar 0,150 ($p > 0,05$), disimpulkan tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti belum membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran.
- 2) Rasio Kontribusi PDRB terhadap Provinsi sebesar 0,040 ($p < 0,05$), disimpulkan ada perbedaan rasio kontribusi PDRB terhadap Provinsi yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti semakin membaiknya

- rentang kendali (*span of control*) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran.
- 3) Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,082 ($p > 0,05$), disimpulkan tidak ada perbedaan Kesejahteraan Masyarakat yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti belum membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran.
 - 4) Angka Kemiskinan sebesar 0,006 ($p < 0,05$), disimpulkan ada perbedaan Angka Kemiskinan yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran dan
 - 5) Pertumbuhan Penduduk Tidak Miskin sebesar 0,401 ($p > 0,05$), disimpulkan tidak ada perbedaan pertumbuhan penduduk tidak miskin yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti belum membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kepulauan Meranti
 pasca pemekaran

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Uji Independent
Indikator Pelayanan Publik di Kabupaten
Kepulauan Meranti dan Kabupaten
Bengkalis

| No | Indikator | Asymp. Sig. (2-tailed) | Kesimpulan |
|----|--|------------------------|------------|
| 1 | Jumlah Siswa Per sekolah Tingkat SD-SMP | 0,000 | <0,05 |
| 2 | Jumlah Siswa Per Guru Tingkat SD-SMP | 0,030 | <0,05 |
| 3 | Jumlah Siswa Per Sekolah Tingkat SMA Sederajat | 0,040 | <0,05 |
| 4 | Jumlah Siswa Per Guru Tingkat SMA Sederajat | 0,210 | >0,05 |
| 5 | Ketersediaan Fasilitas Kesehatan | 0,004 | <0,05 |
| 6 | Ketersediaan Tenaga Kesehatan | 0,002 | <0,05 |
| 7 | Kualitas Infrastruktur | 0,087 | >0,05 |

Sumber: Data Olahan, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Uji Independent Sample T-Test menggunakan SPSS Kinerja Pelayanan Publik Daerah yang disajikan pada tabel 4 diketahui pada kolom *Levene's Test for Equality of Variances* memiliki nilai signifikansi:

- 1) Jumlah siswa persekolah tingkat SD dan SMP sebesar 0,000 ($p < 0,05$), disimpulkan ada perbedaan jumlah siswa persekolah tingkat SD dan SMP yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten

Kepulauan Meranti pasca pemekaran.

- 2) Jumlah siswa perguruan tingkat SD dan SMP sebesar 0,030 ($p < 0,05$), disimpulkan ada perbedaan jumlah siswa perguruan tingkat SD dan SMP yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran.
- 3) Jumlah siswa persekolah tingkat SMA sederajat sebesar 0,040 ($p < 0,05$), disimpulkan ada perbedaan jumlah siswa persekolah tingkat SMA sederajat yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran.
- 4) Jumlah siswa perguruan tingkat SMA sederajat sebesar 0,210 ($p > 0,05$), disimpulkan tidak ada perbedaan jumlah siswa perguruan tingkat SMA sederajat yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti belum membaiknya rentang kendali

(*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran.

- 5) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan sebesar 0,004 ($p < 0,05$), disimpulkan ada perbedaan Jumlah ketersediaan fasilitas kesehatan yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran.
- 6) Ketersediaan Tenaga Kesehatan sebesar 0,002 ($p < 0,05$), disimpulkan ada perbedaan Jumlah ketersediaan Tenaga kesehatan yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran dan,
- 7) Kualitas Infrastruktur sebesar 0,087 ($p > 0,05$), disimpulkan tidak ada perbedaan Kualitas infrastruktur yang signifikan antara Kabupaten Kepulauan Meranti (DOB) dan Kabupaten Bengkalis (Daerah Induk) pasca pemekaran. Selain itu, dampak Pemekaran yang dilakukan terbukti belum membaiknya rentang kendali (*span of control*)

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran.

Pembahasan.

Dari sisi kinerja perekonomian daerah setelah enam tahun pemekaran pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru (Kabupaten Kepulauan Meranti) lebih fluktuatif ketimbang daerah induk yang relatif stabil, pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran lebih tinggi selain itu pendapatan perkapita juga lebih tinggi dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis. Hasil uji beda juga menunjukkan ($>0,05$); tidak ada perbedaan yang signifikan dari pemekaran daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti. Tingginya angka kemiskinan Menunjukkan bahwa pemekaran mendorong pelepasan penduduk miskin dari daerah induk ke DOB. Data menunjukkan bahwa penduduk miskin justru jadi terkonsentrasi di DOB. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah DOB belum dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah induk, meski kesejahteraan DOB telah relatif sama dengan daerah bahkan daerah pemekaran memiliki pertumbuhan yang lebih baik dari rata-rata daerah induk.

Hasil penelitian ini semakin diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya oleh Emie (2011), menyatakan bahwa hasil pemekaran daerah tidak berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi DOB dibandingkan dengan daerah induk, disebabkan masih dominannya peran sektor pertanian dan belum berkembang sektor pengolahan.

Demikian juga dalam prosentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk, daerah DOB mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah induk.

Dari sisi pelayanan publik daerah, kinerja pelayanan Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran mengalami peningkatan pelayanan publik yang cukup baik bahwa lebih tinggi dari kabupaten induk baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Pertumbuhan guru tingkatan dasar sampai menengah atas yang efektif, disisi lain daya tampung sekolah yang memadai. Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang lebih baik dari tahun ketahun. Namun pada aspek infrastruktur, kualitas jalan didaerah induk masih lebih baik dari DOB. Hasil uji beda juga menunjukkan ($>0,05$); tidak ada perbedaan yang signifikan dari pemekaran daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis.

Ini memberikan gambaran perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik ini pun juga besar. Untuk kabupaten induk, tingkat pelayanan publik pasca pemekaran wilayah juga cenderung stabil. Optimalnya pelayanan publik didaerah pemekaran disebabkan tersedianya tenaga layanan publik dan efektifnya pemanfaatan pelayanan publik. Oleh karena itu, dampak pemekaran daerah terhadap penyediaan pelayanan publik dinilai baik bagi DOB dan semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Rachim (2013), menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di kota Serang ternyata mampu mengimbangi bahkan sedikit lebih baik dibandingkan kinerja ekonomi dan kinerja pelayanan publik kabupaten Serang yang merupakan kabupaten induk. Secara umum, pemekaran wilayah menumbuhkan harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik khususnya dalam hal pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, maupun hal-hal lain yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan rentang kendali, didapat bahwa jangkauan jarak pelayanan yang relatif lebih dekat memberikan dampak positif terhadap rentang kendali antara DOB dan Kabupaten induk. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada daerah tertentu lebih pendeknya jarak itu tidak dibarengi oleh rendahnya biaya transportasi. Hal ini karena perbedaan kondisi geografis yang cukup signifikan diantara daerah-daerah pemekaran tersebut. Daerah-daerah pemekaran yang berada pada daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah yang berada di daratan..

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap Dampak Pemekaran Daerah dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti terutama dalam aspek percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta bagaimana rentang kendali (*span of control*) antara daerah Daerah Otonom baru dengan

daerah induk maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Simpulan

- 1) Aspek Kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum belum mampu menyaingi kinerja daerah induknya yaitu kabupaten Bengkalis, dengan kata lain dampak pemekaran belum menunjukkan hasil yang positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi walaupun jika dilihat ada beberapa indikator kinerja ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB Perkapita mampu tumbuh lebih baik dari pada daerah induknya.
- 2) Aspek Pelayanan Publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum sudah mampu menyaingi kinerja daerah induknya yaitu kabupaten Bengkalis, dengan kata lain dampak pemekaran menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah walaupun jika dilihat ada beberapa indikator kinerja pelayanan publik seperti Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Prosentase Kondisi jalan baik yang tumbuh lebih rendah dari pada daerah induknya.
- 3) Dari analisa data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mengenai rentang kendali (*span of control*) antara DOB dan daerah induk, dampak pemekaran yang dilakukan dari kinerja ekonomi daerah terbukti belum membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan sedangkan dari kinerja pelayanan

publik daerah terbukti semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasca kebijakan pemekaran diberlakukan.

Saran

- 1) Pada Aspek perekonomian daerah otonom baru, program-program pemerintah sebaiknya diarahkan pada upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi saja ternyata tidak cukup memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom baru jika angka kemiskinannya juga tinggi, seperti yang terjadi di Kabupaten Meranti. Oleh karena itu, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pada DOB, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya strategis agar dapat mengurangi angka kemiskinan.
- 2) Pada Aspek Pelayanan Publik: Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada DOB perlu senantiasa ditingkatkan, terutama pada infrastruktur. Kondisi Jaringan jalan dalam kondisi baik perlu ditingkatkan guna menunjang mobilitas pembangunan daerah. Infrastruktur ini hendaknya tidak saja diarahkan sebagai penunjang kegiatan pemerintahan, tetapi lebih jauh lagi untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru khususnya pada DOB guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, Antonius (2010); *Dampak Pemekaran Wilayah*, Artikel dalam Majalah Perencanaan Pembangunan. Bappenas. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nation, Development Programme (UNDP). 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Bengkalis Dalam Angka 2016*. Bengkalis.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kepulauan Meranti Dalam Angka 2016*. Kepulauan Meranti.
- Ida, Laode. 2005. *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Jakarta, Media Indonesia, 22 Maret 2005
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachim, Ratri Furry Pustika. 2013. *"Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah"*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Robbins, S.P dan Coulter, M. 2004. *Manajemen*, Ed ke-7, Terjemahan, Penerbit: Intan Sejati Klaten. Jakarta.
- Said Saile, 2009. *Pemekaran Wilayah sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Rertu Agung.
- Sujianto, 2010. *"Kebijakan Pemekaran Daerah Di Provinsi Riau"*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Kajian Kebijakan Publik. Universitas Riau. September. Pekanbaru.
- Yuliati, Emie. 2011. *"Evaluasi Hasil Pemekaran : Studi Kasus Pemekaran Kabupaten"*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Jakarta: Program Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
- <http://www.kemendagri.go.id/media/documents/pembentukan-daerah-daerah-otonomi-di-indonesia-sampai-dengan-tahun-2014>, diakses 30 September 2015.
- <http://otda.kemendagri.go.id/image/file/data-dan-informasi/seputar-otda/total-daerah-otonom.pdf>, diakses 30 September 2015.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
- ____ Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- ____ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.